

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Teori keagenan memberikan penjelasan adanya suatu hubungan kontraktual antara *principal* dan *agent*. Principal merupakan pihak, baik individu maupun entitas, yang memberikan wewenang melalui suatu perjanjian. Sementara itu, agent adalah pihak yang diberi kepercayaan untuk melaksanakan tugas atau kegiatan tertentu guna mewakili kepentingan principal. Dengan demikian, teori ini menekankan adanya pendelegasian wewenang dari principal kepada agent dalam rangka mencapai tujuan yang telah disepakati (Periansya et al., 2021).

Teori agensi menjelaskan bahwa sering terjadi ketidakseimbangan informasi antara prinsipal, yaitu pemerintah yang memiliki akses langsung terhadap data, dan agen, yakni masyarakat sebagai pihak penerima informasi. Ketidakseimbangan ini berpotensi menimbulkan asimetri kekuasaan yang dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang atau praktik korupsi. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan akuntabilitas dengan menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Peningkatan akuntabilitas ini akan memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat menjadi lebih transparan

dan merata, sehingga kesenjangan informasi antara pemerintah daerah dan publik dapat diminimalkan (R. A. R. Putri & Amanah, 2020).

Selain itu, teori keagenan juga menyatakan bahwa peran dari pemerintah daerah adalah agen yaitu bertindak mewakili kepentingan khalayak luas sebagai prinsipal. Para pejabat publik dipandang memiliki kredibilitas karena dinilai mampu memahami serta melaksanakan tanggung jawab yang diberikan. Keyakinan ini didasarkan pada anggapan bahwa pemerintah daerah dapat menjalankan fungsinya secara efektif demi kepentingan masyarakat. Dalam perspektif teori keagenan, agen berkewajiban mengelola sumber daya dan aset yang dimiliki dengan tujuan meningkatkan pendapatan bagi prinsipal. Lebih lanjut, dengan adanya dukungan berupa sumber daya tambahan, khususnya dari pemerintah kabupaten tertentu, pemerintah daerah diharapkan mampu menyediakan layanan publik yang lebih berkualitas serta memberikan manfaat sosial yang lebih optimal bagi masyarakat (Aulia & Rahmawaty, 2020).

Dalam kerangka teori agensi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merefleksikan kemampuan pemerintah daerah sebagai agen untuk mengelola maupun menggali potensi lokal secara mandiri serta bertanggung jawab. Selanjutnya, belanja modal mencerminkan bagaimana agen mengalokasikan anggaran untuk investasi jangka panjang yang ditujukan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, dana perimbangan berperan sebagai instrumen intervensi dari prinsipal, yaitu pemerintah pusat, guna menjamin agar pemerintah daerah tetap dapat menjalankan fungsi

pelayanan publik meskipun menghadapi keterbatasan dalam pendapatan asli daerah.

## **2. Pendapatan Asli Daerah**

### **a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Mengacu pada PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dipaparkan secara ringkas bahwasanya pendapatan daerah sebagai seluruh hak yang daerah miliki serta diakui sebagai penambahan kekayaan bersih dalam setahun anggaran. Sementara itu, definisi PAD berdasarkan penjelasan dalam UU No. 33 Tahun 2004 yaitu pendapatan yang didapatkan dan dipungut oleh pemerintah daerah, baik yang bersumber dari pajak maupun bukan pajak sebagaimana aturan yang ada (Saputri & Kurnia, 2020).

Mengacu pada Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 dalam (Niswani et al., 2022) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sumber-sumber PAD mencakup:

1. Pendapatan asli daerah yang sah:
  - a. Pendapatan pajak daerah
  - b. Pendapatan kompensasi daerah
  - c. Pendapatan perusahaan daerah dan pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang terpisah.
  - d. Pendapatan daerah lainnya yang sah.

## 2. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Sumber pendapatan daerah yaitu dari PAD sebagai sumber utama penerimaan pemerintah daerah. Dana yang diperoleh melalui PAD dipergunakan dalam rangka memenuhi kewajiban pemerintah daerah dalam membiayai pengeluaran rutin maupun kebutuhan pembangunan. Selain itu, PAD memiliki peranan krusial dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk dialokasikan ke dalam kas daerah. Tujuan utamanya adalah mendukung pelaksanaan program pembangunan, memperkuat fungsi pengaturan, serta meningkatkan kesejahteraan sosial dan kondisi ekonomi masyarakat sebagai penerima manfaat layanan publik (Nasir, 2019).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dalam (Lubis et al., 2024), Terdapat sebelas jenis pajak daerah yang berlaku di Indonesia, yang terbagi ke dalam dua kelompok utama, yaitu empat jenis pajak provinsi dan tujuh jenis pajak kabupaten/kota. Jenis pajak daerah yang termasuk dalam kewenangan pemerintah provinsi antara lain: (1) pajak kendaraan bermotor dan pajak atas kapal, (2) pajak atas biaya perjalanan kendaraan bermotor maupun kapal, (3) pajak bahan bakar, serta (4) pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air tanah maupun air permukaan. Sementara itu, untuk pajak bumi dan bangunan tingkat kedua sebagai berikut:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Penerangan jalan
- c. Pajak Reklame

- d. Pajak Hiburan
- e. Pajak Restoran
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
- g. Pajak Parkir

### **3. Belanja Modal**

#### **a. Pengertian Belanja Modal**

Pengeluaran anggaran oleh pemerintah daerah guna memperoleh aset tetap maupun aset yang lain yang memiliki masa manfaat di atas satu periode anggaran dinamakan dengan belanja modal. Aset tersebut dimanfaatkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan publik serta meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pemerintahan (Wahyudin & Hastuti, 2020). Belanja modal yakni suatu instrumen kebijakan yang digunakan pemerintah guna melayani masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan pendapatan daerah. Melalui pengadaan maupun peningkatan infrastruktur, belanja modal berperan penting dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi kelancaran aktivitas perekonomian. Selain itu, belanja modal terhadap kinerja fiskal pemerintah daerah mempunyai pengaruh signifikan, yang salah satunya dapat dievaluasi melalui Indeks Kemandirian Daerah (Noor Rosyadi et al., 2024).

Belanja modal bisa dinyatakan pula sebagai bentuk investasi pemerintah daerah dengan tujuan memperoleh aset tetap, seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas umum, serta pengembangan layanan publik lainnya. Melalui alokasi belanja modal, pemerintah daerah berupaya meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat sekaligus mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di wilayahnya (Fadilah & Andriani, 2025). Menurut Permendagri No. 64 Tahun 2020 (DJPk Kemkeu, 2021) mengenai Pedoman Penyusunan Rencana Pendapatan dan Belanja Daerah, Belanja modal merupakan pengeluaran yang dialokasikan dalam rangka membiayai perolehan aset tetap maupun aset yang lain. Perolehan aset tetap melalui belanja modal umumnya memiliki masa manfaat dua belas bulan lebih, dan dimanfaatkan untuk operasional pemerintahan, serta memenuhi batasan nilai minimum pembiayaan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah. Dengan demikian, pelaksanaan belanja modal disesuaikan dengan tujuan dan sasaran pengeluaran yang telah direncanakan, yang secara garis besar mencakup:

1) Belanja Modal Tanah;

Belanja modal tanah merupakan alokasi anggaran yang ditujukan untuk membiayai kegiatan perolehan tanah dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah daerah. Penganggaran ini sekaligus dimaksudkan untuk menjamin pemanfaatan tanah secara produktif dan berkelanjutan.

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin;

Belanja modal pada pos peralatan dan mesin dialokasikan untuk membiayai pengadaan aset berupa peralatan maupun mesin. Jenis investasi ini mencakup antara lain kendaraan bermotor, mesin produksi, perangkat elektronik, peralatan kantor, serta berbagai sarana lain yang memiliki nilai ekonomi signifikan. Aset tersebut dikategorikan sebagai belanja modal karena memiliki masa manfaat lebih dari dua belas bulan dan dapat digunakan dalam kondisi berfungsi optimal.

3) Belanja Modal Bangunan dan Gedung;

Belanja modal pada kategori gedung dan bangunan dialokasikan untuk membiayai kegiatan pembangunan serta penyediaan fasilitas fisik. Pengeluaran ini mencakup seluruh gedung maupun sarana penunjang yang diperoleh pemerintah daerah guna memenuhi kebutuhan perkotaan serta dipastikan berada dalam kondisi siap digunakan atau beroperasi.

4) Belanja Modal untuk infrastruktur jalan, jaringan, dan sistem irigasi;

Belanja modal yang dialokasikan pada jalan, jaringan, serta sistem irigasi bertujuan untuk menyediakan pembiayaan bagi pembangunan dan pengelolaan infrastruktur tersebut. Alokasi ini mencakup jalan maupun jaringan yang dibangun, dimiliki, dan/atau berada di bawah kendali pemerintah daerah serta digunakan untuk mendukung keberlangsungan operasionalnya.

5) Belanja Modal untuk aset tetap lainnya;

Investasi pada aktiva tetap lainnya dimaksudkan untuk membiayai aktiva lainnya, yang diperoleh dan dipergunakan dalam lingkungan badan usaha milik negara serta siap untuk dipergunakan.

6) Belanja Modal pada aset tidak berwujud;

Pengeluaran modal yang dialokasikan untuk aset tidak berwujud dicatat sebagai bagian dari investasi pemerintah pada aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset tetap. Oleh karena itu, pencatatannya dilakukan pada nilai tercatat dan dilaporkan dalam kelompok "Aset Lain-lain."

#### **4. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

##### **a. Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dievaluasi melalui analisis terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). SKPD merupakan unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer dan memiliki tanggung jawab penuh terhadap pengelolaan administrasi pada instansi masing-masing, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga, serta unit pemerintahan daerah lainnya. Secara fungsional, SKPD berperan sebagai perangkat daerah yang mengelola anggaran, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, serta memastikan pelaksanaan program kerja

sesuai dengan tujuan pembangunan daerah (Mulia Andirfa, S.E., 2018:10).

Kinerja keuangan pemerintah daerah dipahami sebagai indikator utama untuk menilai sejauh mana keberhasilan pengelolaan serta administrasi keuangan daerah dalam suatu periode tertentu. Pengukuran terhadap kinerja keuangan memiliki tujuan penting, yakni mendorong peningkatan efektivitas administrasi pemerintahan. Hal ini disebabkan karena evaluasi kinerja dapat membantu pemerintah daerah untuk lebih terarah pada pencapaian sasaran kebijakan, memenuhi tuntutan akuntabilitas publik, serta memperkuat kualitas komunikasi antar lembaga (Clarisa Sukmaning Ati et al., 2023).

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Nomor 108 Tahun 2000 dalam Mulia Andirfa, S.E. (2018:11) menyatakan bahwa pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan dalam Rancangan APBD meliputi:

1. DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berperan sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam memberikan persetujuan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah, khususnya terkait pengelolaan serta pelaporan keuangan daerah.

2. Badan Eksekutif

Lembaga eksekutif merupakan institusi pemerintahan yang memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan fungsi pelayanan publik

di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Struktur lembaga ini meliputi jabatan-jabatan strategis, antara lain gubernur, wakil gubernur, wali kota, serta pimpinan badan daerah lainnya.

### 3. Badan Pengawas Keuangan

Badan Pengawas Keuangan (BAP) merupakan lembaga yang memiliki fungsi utama dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah yang berada di bawah kewenangan pemerintah daerah. Pengawasan tersebut dilaksanakan melalui tiga instansi utama, yaitu Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

### 4. Investor, Kreditor, dan Sponsor

Berbagai badan atau organisasi, baik di tingkat nasional maupun internasional, termasuk lembaga pemerintah, lembaga keuangan, serta entitas lainnya, berperan sebagai pihak yang menyalurkan atau menyediakan dana kepada pemerintah daerah.

### 5. Analisa ekonomi dan inspektur pemerintah daerah

Badan ekonomi dan pengawasan pemerintah daerah adalah lembaga yang memiliki fungsi utama dalam melakukan pengawasan terhadap berbagai aktivitas pemerintah daerah. Pengawasan tersebut mencakup pemantauan terhadap beragam institusi, seperti lembaga pendidikan, lembaga keahlian, lembaga penelitian, serta institusi lain yang berada di bawah kewenangan pemerintah daerah.

## 6. Masyarakat

Masyarakat dalam konteks ini merujuk pada sekelompok individu yang berperan dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya kekuasaan pemerintahan. Kelompok tersebut terutama mencakup pihak-pihak yang memperoleh layanan publik dari pemerintah daerah maupun yang melakukan transaksi pembelian barang dan jasa yang disediakan oleh otoritas pemerintah daerah.

## 7. Pemerintah

Pemerintah menetapkan ketentuan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat penilaian atas akuntabilitas gubernur dalam kapasitasnya sebagai perwakilan pemerintah.

# 5. Dana Perimbangan

## a. Pengertian Dana Perimbangan

Definisi dari dana perimbangan yakni bentuk transfer fiskal dari pemerintah pusat kepada daerah dalam bentuk alokasi dana untuk mendukung pembiayaan belanja daerah. Instrumen ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan fiskal antarpemerintah, sehingga kebutuhan pembiayaan di daerah dapat terpenuhi secara lebih adil. Selain itu, penyaluran dana perimbangan juga dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan fiskal, baik yang terjadi antara pemerintah pusat dan daerah secara vertikal, maupun antar-daerah secara horizontal (Defitri et al., 2021).

Berlandaskan pada UU No. 33 Tahun 2004 dalam Anggi Juwita (2025) menyatakan bahwa dana perimbangan dipahami sebagai salah satu sumber penerimaan dalam APBN yang dialokasikan pemerintah pusat pada pemerintah daerah. Menurut Padang & Padang (2024), Dana Perimbangan memiliki tujuan utama untuk meminimalisasi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Upaya pencapaian tujuan ini diwujudkan melalui mekanisme distribusi keuangan yang dilaksanakan secara adil, proporsional, demokratis, transparan, serta efisien sehingga tercipta keseimbangan dalam pengelolaan keuangan negara.

Dana perimbangan bisa dinyatakan sebagai alokasi dari APBN dan kemudian disalurkan pada pemerintah daerah otonom. Tujuan utama dari dana ini adalah mendukung pelaksanaan rencana pembagian keuangan pada tingkat daerah secara proporsional dan berkeadilan. Komponen dana perimbangan terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH), yang masing-masing memiliki peran strategis dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah (Angga Dwijayanto, 2022).

#### 1) Dana Alokasi Umum (DAU)

Ini merupakan dana dari APBN dengan alokasi dari pemerintah pusat pada pemerintah daerah (Harahap & Erlina, 2021).

#### 2) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Ini adalah instrumen keuangan negara yang difokuskan untuk mendukung pembiayaan kebutuhan fasilitas layanan dasar masyarakat yang

masih belum memenuhi standar, sekaligus berfungsi sebagai upaya percepatan pembangunan di daerah. Penentuan besaran DAK untuk setiap daerah dilakukan setiap tahun, yang didasarkan pada ketersediaan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mengingat sifatnya yang bersifat spesifik, DAK tidak dialokasikan secara merata kepada seluruh daerah, melainkan hanya diberikan kepada daerah tertentu. Pemilihan daerah penerima DAK ditentukan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan tiga kriteria, yaitu kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis (Arniati, 2023).

### 3) Dana Bagi Hasil (DBH)

Ini termasuk komponen pendapatan dalam APBN yang alokasinya ditujukan pada pemerintah daerah dengan persentase tertentu. Alokasi tersebut bertujuan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan daerah sekaligus memperkuat pelaksanaan desentralisasi fiskal (Direktorat Jendral Perbendaharaan, 2022). Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan bagian dari APBN dengan alokasi pada pemerintah daerah dengan persentase tertentu. Alokasi dana ini bertujuan untuk mendukung pembiayaan kebutuhan daerah guna menyelenggarakan desentralisasi fiskal. Selain itu, DBH juga dimaksudkan dalam rangka menunjang keseimbangan vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam penentuan besaran alokasinya, pemerintah memperhatikan potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah penghasil, sehingga distribusi dana dapat lebih proporsional dan berkeadilan (Yuliani et al., 2021).

## B. Penelitian Terdahulu

### 1. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No.	Judul Penelitian, Nama Peneliti dan Tahun	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	<p>“Pengaruh pendapatan asli daerah, belanja modal, dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Studi Empiris Kabupaten dan Kota Se-Eks Karesidenan Pekalongan Periode 2016-2020)” (Ika Novita Ardelia, Hilda Kumala Wulandari, Yenny Ernitawati, 2022)</p>	<p>Variabel Independen: -Pendapatan Daerah -Belanja Modal -Dana Perimbangan</p> <p>Variabel Dependen: -Kinerja Keuangan</p>	<p>1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 2. Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 3. Dana Perimbangan (DJP) terbukti berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 4. Pada saat yang sama, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p>
2.	<p>“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage Terhadap Kinerja Keuangan” (Hilen Julianti et al., 2024)</p>	<p>Variabel Independen : -Pendapatan Asli Daerah -Dana Perimbangan -Ukuran Pemerintah Daerah -Leverage</p> <p>Variabel Dependen :</p>	<p>- Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan -Ukuran pemerintah daerah dan leverage tidak berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja keuangan</p>

No.	Judul Penelitian, Nama Peneliti dan Tahun	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		Kinerja Keuangan	
3.	“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat)” (Bianca Rahardjo, 2023)	Variabel Independen : -Pendapatan Asli Daerah -Dana Perimbangan -Belanja Modal  Variabel Dependen : -Kinerja Keuangan	1. Pendapatan asli daerah terbukti memberikan dampak positif dan berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan keuangan di Kabupaten Bandung Barat. 2. Dana perimbangan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja keuangan daerah. 3. Belanja modal memberikan dampak signifikan namun negatif terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. 4. Pendapatan daerah, belanja modal, dan dana perimbangan memberikan dampak positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Bandung Barat.
4.	“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Belanja Modal, Dan Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun (2018-2023))” (Kusuma Herawati & Murti, 2024)	Variabel Independen: -Pendapatan Asli Daerah -Belanja Modal -Opini Audit  Variabel Dependen : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Bukti dari opini audit dan belanja modal yang dilakukan pada saat yang bersamaan memperlihatkan bahwa faktor faktor tersebut secara signifikan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Maka, untuk mendapatkan hasil keuangan yang terbaik, pemerintah daerah harus fokus dan meningkatkan pengelolaan ketiga faktor tersebut secara bersamaan.

No.	Judul Penelitian, Nama Peneliti dan Tahun	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
5.	<p>“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Sumatera dan Jawa Tahun 2018-2022” (N. Maharani &amp; Armaini, 2022)</p>	<p>Variabel independen: -PAD -DAU -Belanja Modal</p> <p>Variabel dependen: Kinerja Keuangan Pemda.</p>	<p>- Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja keuangan Pemerintah Daerah, - Dana Alokasi Umum secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. - Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.</p>
6.	<p>“Belanja Modal Memoderasi Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah” (Luh Nopia Yudiastuti, Edy Sujana, 2025)</p>	<p>Variabel Independen: -Pendapatan Asli Daerah -Dana Perimbangan</p> <p>Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y)</p> <p>Variabel Moderasi: Belanja Modal (Z)</p>	<p>-Belanja Modal terbukti secara signifikan memperkuat pengaruh hubungan PAD dan -Dana Perimbangan dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Jika pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah itu tinggi maka tingkat kemandirian daerah juga tinggi. Investasi yang cermat dalam infrastruktur pelayanan publik juga dapat mendorong peningkatan PAD di masa mendatang</p>
7.	<p>“Pengaruh Kemandirian, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah dan pengelolaan belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah”</p>	<p>Variabel Independen: -Rasio Kemandirian Daerah -Efektifitas Pendapatan Asli Daerah -Pengelolaan</p>	<p>Kemandirian Daerah, Efektifitas Pendapatan Daerah, serta Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah.</p>

No.	Judul Penelitian, Nama Peneliti dan Tahun	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	(Permatasari & Trisnaningsih, 2022)	Belanja Daerah  Variabel Dependen : Kinerja Keuangan Daerah	
8.	“Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi daerah, size daerah dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemda” (Ilmi, 2023)	Variabel Independen: -Pertumbuhan Ekonomi Daerah -Size Daerah -Pendapatan Asli Daerah  Variabel Dependen : Kinerja Keuangan Pemda  Variabel Mediasi : Kompetensi Pegawai	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh baik dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keberhasilan fiskal Kabupaten Bandung Barat. - Perimbangan keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat. - Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dipengaruhi secara signifikan dan negatif oleh belanja modal. Pengaruh positif dan nyata pendapatan daerah, belanja modal, dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Bandung Barat memiliki tingkat signifikansi.
9.	“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi, Dana Umum, Alokasi Khusus dan Bagi Hasil Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah eks	Variabel Independen : -Pendapatan Asli Daerah -Dana Alokasi Umum -Dana Alokasi Khusu	Dana bagi hasil terhadap kinerja keuangan pemerintah eks karesidenan surakarta tahun anggaran 2016-2023. berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan

No.	Judul Penelitian, Nama Peneliti dan Tahun	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	Karesidenan Surakarta Tahun Anggaran 2016-2023” (Ismayasari et al., 2024)	-Dana Bagi Hasil  Variabel Dependen : Kinerja Keuangan Pemda	pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, Dana alokasi umum berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja keuangan Pemerintah Eks Karesidenan Surakarta tahun anggaran 2016-2023, Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak memiliki dampak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Eks Karesidenan Surakarta tahun anggaran 2016- 2023. Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja keuangan Pemerintah Eks Karesidenan Surakarta tahun anggaran 2016-2023.
10.	“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Size Pemerintah Daerah, Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah” (Andaresta et al., 2021)	Variabel Independen : -Pendapatan Asli Daerah -Size Pemerintah Daerah -Tingkat Kemiskinan  Variabel Dependen : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	-Pendapatan asli daerah mempunyai signifikansi pengaruhnya pada kinerja keuangan pemerintah daerah, -Dana perimbangan mempunyai pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, Size pemerintah daerah tidak mempunyai pengaruh pada kinerja keuangan pemerintah Daerah -Tingkat kemiskinan mempunyai pengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah.

No.	Judul Penelitian, Nama Peneliti dan Tahun	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
11.	<p>“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara)” (Noviana Sri Hastuti, 2024)</p>	<p>Variabel Independen: -Pendapatan Asli Daerah -Belanja Modal</p> <p>Variabel Dependen : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah</p>	<p>1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (studi kasus: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara). 2. Belanja Modal memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (studi kasus: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara). 3. Sementara itu, PAD dan Belanja Modal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (studi kasus: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara).</p>
12.	<p>“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia dengan Partisipasi Masyarakat sebagai Variabel Moderasi” (Fadilah &amp; Andriani, 2025)</p>	<p>Variabel Independen : -Pendapatan Asli Daerah -Belanja Modal -Dana perimbangan</p> <p>Variabel Dependen : -Kinerja keuangan pemerintah daerah</p> <p>Variabel Moderasi : -Partisipasi masyarakat</p>	<p>pendapatan asli daerah dan belanja modal memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun dana perimbangan tidak memiliki pengaruh signifikan. Partisipasi masyarakat secara efektif mampu memoderasi hubungan antara variabel independen dan kinerja keuangan</p>

No.	Judul Penelitian, Nama Peneliti dan Tahun	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
13.	“Pengaruh Belanja Modal Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2022” (Anggi Juwita, 2025)	Variabel Independen : -Belanja modal -Dana perimbangan -Pendapatan asli daerah  Variabel Dependen : -Kinerja keuangan daerah	belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, dan pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah di Provinsi Sumatera.
14.	“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali” (Eryana et al., 2025)	Variabel Independen : -Pendapatan Asli Daerah -Dana Alokasi Umum -Belanja Modal  Variabel Dependen : -Kinerja keuangan pemerintahan	hanya PAD yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, sedangkan DAU dan Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan. Namun secara simultan, ketiga variabel tersebut secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
15.	“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta	Variabel Independen : - Pendapatan Asli Daerah -Dana Perimbangan -Dana Keistimewaan -Belanja Modal  Variabel Dependen : -Kinerja keuangan	a. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013-2018. b. Dana Perimbangan berpengaruh signifikan negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Daerah

No.	Judul Penelitian, Nama Peneliti dan Tahun	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	Tahun Anggaran 2013-2018)” (Prastiwi & Aji, 2020)	pemerintah daerah	Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013-2018. c. Dana Keistimewaan berpengaruh tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. d. Belanja Modal berpengaruh tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. e. Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan, dan Belanja Modal secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2013-2018.
16.	“Dampak Pendapatan Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah” (Atmoko & Khairudin, 2022)	Variabel Independen : -Pendapatan Daerah -Belanja Modal  Variabel Dependen : -Kinerja keuangan pemerintah daerah	pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan pada kinerja keuangan pemerintah daerah, sementara itu belanja modal tidak berdampak atau berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Ini menyiratkan bahwasannya apabila pendapatan asli daerah yang diperoleh tinggi, semakin meningkat pula presentasi kinerja keuangan pemerintah daerah.
17.	“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan	Variabel Independen : -Pendapatan Asli	Pendapatan Asli Daerah dengan nyata menaikkan kinerja keuangan pada pemerintah di

No.	Judul Penelitian, Nama Peneliti dan Tahun	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kalimantan Barat” (Rimenda Tiara Sembiring, Ira Grania Mustika, 2025)	Daerah -Dana perimbangan -Belanja modal  Variabel Dependen : -Kinerja Keuangan pemerintah daerah	Kalimantan Barat, sementara Dana Perimbangan justru berkontribusi negatif pada kinerja keuangan. Sementara itu, Belanja Modal tidak terbukti memberikan pengaruh signifikan.
18.	“Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Studi pada Kabupaten Aceh Tamiang)” (Ayu Rohanda & Azhar, 2023)	Variabel Independen : -Belanja modal -Pendapatan asli daerah -Dana alokasi umum  Variabel Dependen : -Kinerja keuangan daerah	Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan modal belanja serta Dana Alokasi Umum secara parsial tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Sementara itu, hasil uji F menunjukkan bahwa secara simultan variabel modal belanja, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
19.	“Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-	Variabel Independen : -Pendapatan asli daerah -Dana alokasi umum -Belanja modal  Variabel Dependen :	PAD memberi pengaruhnya kepada kinerja keuangan Pemda, dana alokasi umum tidak memberi pengaruhnya kepada kinerja keuangan pemerintah daerah dan belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Keseluruhan variabel independen dengan bersama-

No.	Judul Penelitian, Nama Peneliti dan Tahun	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	2020” (Simamora & Budiwitjaksono, 2022)	-Kinerja keuangan pemerintah daerah	sama (simultan) memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai variabel independen.
20.	“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pada 19 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2020” (Fernandes & Putri, 2022)	Variabel Independen : -Pendapatan asli daerah -Belanja modal  Variabel Dependen : -Kinerja keuangan daerah	pendapatan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.
21.	“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2017-2021” (Ni Putu Ayu Septiyani Putri & Gede Adi Yuniarta, 2023)	Variabel Independen : -Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal  Variabel Dependen : -Kinerja Keuangan Pemerintah	PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. variabel dana perimbangan dan belanja modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
22.	“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dana	Variabel Independen : - Pendapatan Asli Daerah -Belanja Modal	PAD dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan. dana perimbangan juga ditemukan memoderasi hubungan antara

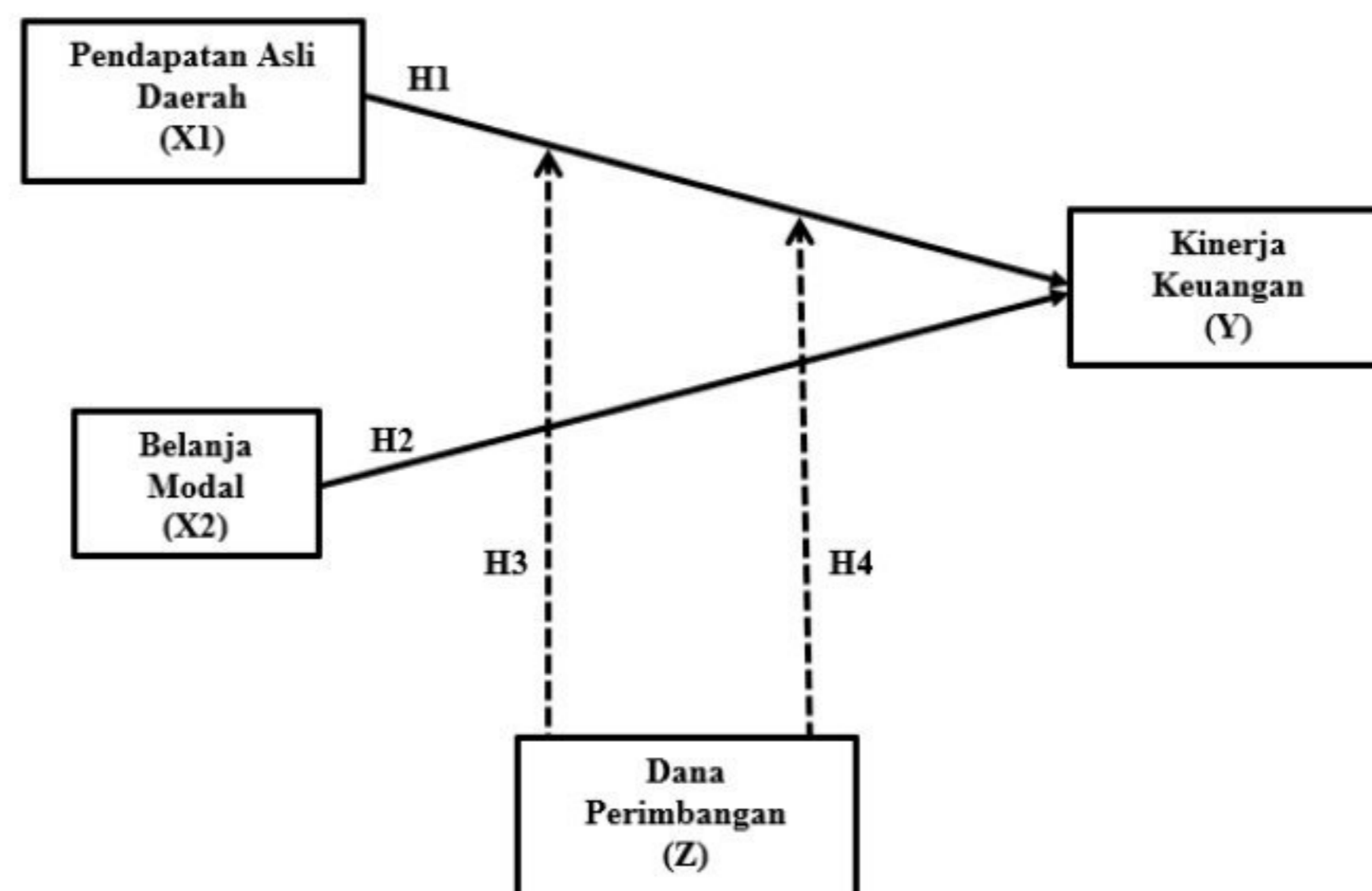
No.	Judul Penelitian, Nama Peneliti dan Tahun	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	Perimbangan Sebagai Pemoderasi di Kabupaten/Kota Sumatera Utara” (Ruth Septaria Hutapea, 2023)	Variabel Dependen : -Pertumbuhan ekonomi  Variabel pemoderasi : -Dana Perimbangan	PAD dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi.
23.	“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah” (B. Maharani et al., 2024)	Variabel Independen : -Pendapatan asli daerah -Belanja modal  Variabel Dependen : -Kinerja keuangan pemerintah	PAD mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah, sedangkan belanja modal tidak mempunyai pengaruh.
24.	“Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat” (Rustiyani, Nova & Barus, 2023)	Variabel Independen : -PAD -Dana Perimbangan -Belanja Modal  Variabel Dependen : - Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Ada pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan yang artinya Pemerintah Daerah Kabupaten Barat masih bergantung dengan mengandalkan dana dari Pemerintah Pusat untuk mengelola daerahnya.
25.	“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat II di Provinsi Jawa Timur Periode 2018 –2022”	Variabel Independen : - Pendapatan Asli Daerah -Belanja Modal  Variabel Dependen :	PAD mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sementara untuk belanja modal tidak berpengaruh signifikan.

No.	Judul Penelitian, Nama Peneliti dan Tahun	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	(Clarisa Sukmaning Ati et al., 2023)	- Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	
26.	“Pengaruh Dana Perimbangan Belanja Modal dan Fiscal Stress Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara” (Padang & Padang, 2024)	Variabel Independen : -Dana perimbangan -Belanja modal -Fiscal stress  Variabel Dependen : -Kinerja keuangan pemerintah daerah	1. Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah memiliki pengaruh signifikan positif. 2. Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah tidak ditemukan pengaruh. 3. Fiscal Stress terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah memiliki pengaruh signifikan positif.
27.	“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera Tahun 2021” (Novita & Arza, 2024)	Variabel Independen : - Pendapatan Asli Daerah -Dana Perimbangan -Belanja Modal  Variabel Dependen : - Kinerja Keuangan Pemerintah	PAD, dana perimbangan, dan belanja modal sebagai variabel dependen secara simultan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah ditemukan pengaruh.
28.	“The effect of pad, capital expenditures, government size, and budget changes on regional financial performance(in central java province in 2019- 2021)” (Safitri et al., 2023)	Variabel Independen : -Pendapatan asli daerah -Belanja modal -Ukuran Pemerintah -Perubahan Anggaran  Variabel Dependen :	PAD dan Ukuran Pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah, sedangkan Belanja Modal dan Perubahan Anggaran berpengaruh negatif terhadap variabel terikat.

No.	Judul Penelitian, Nama Peneliti dan Tahun	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		-Kinerja keuangan daerah	
29.	<p>“The Influence of Intergovernmental Revenue, Capital Expenditure, Original Local Government Revenue and Government Size on Local Government Financial Performance with Audit Opinion as a Moderating Variable” (Diah Ekaningtias, Agus Samekto, Ikhwan Kholid, Silvia Dian Aristiani, 2023)</p>	<p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendapatan Antar Pemerintah</li> <li>-Belanja Modal</li> <li>-Pendapatan Asli Daerah</li> <li>-Ukuran Pemerintah</li> </ul> <p>Variabel Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Kinerja keuangan pemerintah daerah</li> </ul> <p>Variabel Moderasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Opini Audit</li> </ul>	<p>kinerja keuangan pemerintah daerah dipengaruhi secara signifikan oleh pendapatan antarpemerintah, belanja modal, PAD, dan ukuran pemerintah.</p>
30.	<p>“Local Revenue, Capital Expenditure, and E-government Impact on the Financial Performance” (A’yun et al., 2024)</p>	<p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Pendapatan Daerah</li> <li>-Belanja Modal</li> <li>-Dampak E-Government</li> </ul> <p>Variabel Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Kinerja Keuangan</li> </ul>	<p>PAD terhadap kinerja keuangan tidak berpengaruh signifikan, sedangkan e-government ada pengaruh positif, dan belanja modal memiliki pengaruh negatif.</p>

### C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini yaitu mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Dana Perimbangan Sebagai Variabel Moderasi. Kerangka konseptual penelitian ini ada di bawah ini:



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

### D. Hipotesis Penelitian

#### 1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

PAD mencakup beberapa komponen, termasuk pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah tersendiri, dan berbagai jenis pendapatan sah lainnya. PAD memainkan peran penting sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan daerah. Sumber pendapatan ini berasal dari potensi ekonomi yang dimiliki daerah dan dikelola mandiri oleh pemerintah daerah dengan tetap

mengacu kepada aturan perundang-undangan. Tingginya kontribusi PAD dalam APBD mencerminkan kemandirian fiskal daerah. Oleh karena itu, bertambah besarnya PAD yang diperoleh, semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pusat (Digdowiseiso et al., 2022).

PAD berperan krusial dalam meningkatkan kemandirian fiskal, karena memberikan otonomi keuangan kepada pemerintah daerah serta menekan ketergantungan terhadap transfer dana dari pusat. Tingginya tingkat PAD memungkinkan pemerintah daerah untuk menyusun anggaran secara lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan di wilayahnya. Selain itu, peningkatan PAD turut mendorong terciptanya akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, mengingat masyarakat dapat secara langsung mengawasi pemanfaatan sumber-sumber penerimaan daerah, khususnya yang berasal dari pajak maupun retribusi. Di samping itu, stabilitas PAD memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan investasi pada sektor-sektor strategis, seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan pendidikan, serta peningkatan fasilitas kesehatan. Investasi tersebut pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan efisiensi pelayanan publik sekaligus memperkuat fondasi perekonomian daerah (Fadilah & Andriani, 2025).

Temuan penelitian ini sesuai teori keagenan, yang menekankan bahwa pemerintah daerah sebagai *agen* memiliki tanggung jawab untuk mengelola serta memanfaatkan sumber daya keuangan secara efektif demi kepentingan masyarakat sebagai *prinsipal* atau pihak pemberi dana. Tingginya Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan kemampuan pemerintah daerah menggali dan mengoptimalkan potensi ekonomi di wilayahnya. Kondisi tersebut tidak hanya menunjukkan berkurangnya ketergantungan terhadap transfer dana dari pemerintah pusat, tetapi juga mendorong terciptanya sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih mandiri, efisien, dan berorientasi pada keberlanjutan (O. Putri et al., 2025).

Hasil sejumlah penelitian sebelumnya mengindikasikan bahwa Terdapat hubungan erat antara PAD dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian dari Novita & Arza (2024), Analisis menunjukkan bahwa PAD memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Artinya, pengelolaan dan optimalisasi PAD sangat penting untuk memperkuat kinerja keuangan di tingkat daerah. Maka, bisa diuraikan hipotesis yaitu:

**H<sub>1</sub> : “Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Keuangan Daerah”**

## **2. Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Belanja modal berfungsi sebagai indikator produktivitas pengelolaan anggaran pada pemerintah daerah. Tingginya proporsi belanja modal merefleksikan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan secara lebih efektif di wilayahnya. Dengan demikian, pemanfaatan sumber daya yang tersedia selalu berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat (Digdowiseiso et al., 2022).

Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Anggi Juwita (2025) dengan hasil belanja modal secara simultan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berpengaruh signifikan dan negatif. Di samping itu, Novita & Arza (2024) juga menunjukkan temuan yaitu belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah memiliki tingkat signifikansi. Maka, bisa diajukan hipotesis yaitu:

**H<sub>2</sub> : “Belanja Modal Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Keuangan Daerah”**

## **3. Dana Perimbangan memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Di Indonesia, Dana Perimbangan berperan sebagai sumber pembiayaan yang disalurkan dari pemerintah pusat ke daerah dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan daerah. Sementara itu, PAD merupakan sumber pendapatan pemerintah

daerah dari pemungutan pajak dan retribusi yang dikenakan kepada masyarakat setempat (Ruth Septaria Hutapea, 2023).

Dalam kerangka teori principal-agent, terdapat kemungkinan munculnya konflik kepentingan antara pihak principal dan agent. Pemerintah daerah sebagai principal memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya daerah secara optimal, termasuk dalam hal pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pihak principal mengharapkan pemerintah daerah mampu menggunakan PAD secara efisien dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. PAD juga berperan sebagai indikator utama dalam mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah. Bertambah tingginya capaian PAD, maka kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik secara mandiri, tanpa terlalu mengandalkan transfer dana dari pemerintah pusat juga akan bertambah besar (Luh Nopia Yudiastuti, Edy Sujana, 2025).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa dana perimbangan, ketika berperan sebagai variabel moderasi, memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keterkaitan antara pendapatan asli daerah, belanja investasi, dan pertumbuhan ekonomi di kabupaten maupun kota di Sumatera Utara. Kehadiran dana perimbangan mampu memperkuat dampak PAD dan belanja investasi terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga hubungan tersebut menjadi lebih nyata. Temuan ini selaras penelitian lain yang menegaskan bahwa dana perimbangan memiliki

peran penting dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah (Ruth Septaria Hutapea, 2023).

**H3 : “Dana perimbangan berpengaruh dalam memperkuat hubungan antara PAD dan Kinerja Keuangan”**

**4. Dana Perimbangan memoderasi pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Dana Perimbangan yaitu implementasi dari kebijakan desentralisasi fiskal yang diatur melalui peraturan pemerintah. Dengan demikian, belanja modal dapat dipandang sebagai instrumen strategis untuk memastikan pemanfaatan dana kompensasi secara efisien dan efektif. Regulasi ini menjamin bahwa alokasi dana kompensasi selaras dengan tujuan pembangunan daerah. Selain itu, ketika belanja infrastruktur difokuskan pada proyek-proyek yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan produktivitas, serta memenuhi kebutuhan masyarakat, belanja infrastruktur publik berfungsi sebagai faktor moderasi yang dapat menguatkan pengaruh Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Luh Nopia Yudiastuti, Edy Sujana, 2025).

Dana Alokasi Umum (DAU) termasuk bentuk dana perimbangan yang bersumber dari pemerintah pusat. Dana ini dibiayai melalui pendapatan APBN dan disalurkan pada pemerintah daerah tanpa disertai syarat tertentu. Fungsi utama DAU adalah sebagai penyeimbang

horizontal, yakni untuk mengurangi kesenjangan antara kebutuhan anggaran pemerintah daerah dan kapasitas ekonomi yang dimilikinya. Dengan demikian, DAU berperan penting dalam mendukung pemerataan pembangunan serta kelancaran pelayanan publik di tingkat daerah (Sema & Riduwan, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Marheni & Triyanto (2023) mengungkapkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) memberikan pengaruh signifikan terhadap belanja modal, karena pendapatan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan setiap tahunnya, sehingga alokasi belanja modal pun meningkat. Namun, jika pendapatan pemerintah daerah menurun, belanja modal juga akan menurun. Berdasarkan hasil penelitian, DAU terbukti memiliki dampak positif dan signifikan terhadap belanja modal di kabupaten/kota di wilayah Jawa Tengah.

**H4 : “Dana perimbangan berpengaruh dalam memperkuat hubungan antara Belanja Modal dan Kinerja Keuangan”**